

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan berbagai narasumber, baik dari BAWASLU DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta masyarakat penerima bantuan sembako murah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Secara institusional, baik dari BAWASLU DKI Jakarta maupun Dinas KPKP tidak menemukan indikasi adanya politisasi dalam penyaluran sembako murah yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi menjelang Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan, program ini dinilai sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, terutama akibat kenaikan harga bahan pokok menjelang Pemilu 2024.
- 2) Pelaksanaan program penyaluran sembako murah dinilai transparan dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, serta berada dalam pengawasan instansi, khususnya BAWASLU DKI Jakarta guna memastikan tujuan dari program sembako murah ini yaitu keadilan distribusi. Tidak ditemukannya adanya bukti langsung maupun tidak langsung dari program ini yang diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu menjelang Pemilu 2024.
- 3) Terdapat perbedaan persepsi yang muncul dari masyarakat yang menerima sembako murah ini. Dimana, sebagian warga menilai bahwa terdapat kemungkinan besar program ini mengandung unsur politis secara tersirat dalam kemasan, momen pelaksanaan, atau pengaruh terhadap preferensi pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pelanggaran dari segi

struktural, akan tetapi persepsi publik tetap bisa melihat bahwa program ini sebagai sinyal politik, terutama jika dilakukan dalam momentum politik.

- 4) Dengan demikian, bahwa penilaian terhadap netralitas bantuan sembako murah ini tidak cukup hanya melihat dari segi administratif atau kelembagaan saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi persepsi, komunikasi politik, maupun dampaknya terhadap opini publik, khususnya dalam momentum politik ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat aspek terhadap komunikasi publik dalam penyelenggaraan program bantuan sosial, khususnya dalam momentum politik seperti Pemilu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial ini dengan tetap sejalan dengan niat dan tujuan dari kebijakan tersebut.
- 2) Lembaga pengawas seperti BAWASLU perlu melakukan pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek administratif saja, tetapi juga pada simbol maupun narasi yang muncul di tengah masyarakat. Penilaian terhadap kemungkinan terjadinya sebuah politisasi dalam bantuan sosial juga harus mencakup sebuah pendekatan kualitatif terhadap adanya persepsi masyarakat dan dinamika sosial di lapangan.
- 3) Kebijakan bantuan sosial perlu dirancang secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, dimana bantuan sosial ini tidak hanya sebagai respon terhadap situasi tertentu seperti Pemilu, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kebijakan yang

konsisten dan berorientasi pada jangka panjang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

